

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, H. Zainuddin. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Rodliyah dan Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Cetakan Kesatu, Rajawali Pers.
- Ilyas, Amir.(2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke VI. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sofyan, Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

Syahrudin, Nawi. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoh Ukhuwah Grafika.

Widiarty. W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91).

C. SKRIPSI

Mahendra, Fahri Issa. 2024, “*PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*” (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Jawa Timur). UPNVJT, Surabaya, 1-64.

D. JURNAL/ARTIKEL

Budi Bahreisy. “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang*

Telekomunikasi (Criminal of Perpetrators of Use of Illegal Radio Frequencies under the Act of Telecommunication)." Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No. 3, 2017. 16 Halaman
<https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.265-276>

Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi Vol. 16 Halaman 59. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350>

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020. 14 Halaman
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinga, Putri Ayu. 2018. *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, No.1. 16 Halaman
[https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56)

Rosnawati, Din, Mohd., & Mujibussalim. 2016. *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No, 1. 16 Halaman
<https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.671>

E. INTERNET

Eko Sudjarwo, diakses di laman Detik Jatim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7769404/polres-lamongan-ungkap-kasus-tppo-2-muncikari-diamankan>, Diakses pada 20 Februari 2025.

Laily Rahmawaty, diakses di laman Antara *Kantor Berita Indonesia*, <https://www.antaranews.com/berita/3523185/polri-ungkap-405-kasus-tppo-selama-periode-2020-2023>, Diakses pada 22 Februari 2025.

Nabila Naibaho, diakses di laman Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-lt5c5abece7e335> , Diakses pada 24 Juli 2025

F. LAIN-LAIN

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Vitiyandono, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamongan, Jawa Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025.